

**MEWUJUDKAN MASYARAKAT INDONESIA MASA DEPAN:
Suatu Tinjauan Khusus Mengenai Pembangunan Daerah dan Peran Perguruan Tinggi**

**Oleh:
Ginandjar Kartasasmita
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas**

**Orasi Ilmiah pada Dies Natalis ke-15 Universitas Bengkulu
Bengkulu, 30 Juli 1997**

I. Pendahuluan

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Selanjutnya, dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya ucapkan selamat kepada segenap sivitas akademika Universitas Bengkulu (UNIB) yang pada hari ini sedang merayakan Lustrum ke-3. Dies Natalis ini tidak hanya berarti bagi UNIB, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Bengkulu karena saya yakin bahwa UNIB menjadi kebanggaan dan sekaligus tumpuan harapan bagi daerah dan masyarakat Bengkulu.

Abad ke-21, telah diambang pintu. Dalam pergantian abad ini bangsa kita sedang memasuki tahun terakhir Repelita VI dan akan memasuki Repelita VII, Repelita kedua dari PJP II. Momentum ini begitu penting, karena tantangan yang akan dihadapi dalam milenium baru itu jelas akan lebih berat dan kompleks dari masa-masa sebelumnya. Pada masa itu kita sudah betul-betul masuk era globalisasi, karena pada tahun 2003 ASEAN telah menjadi satu kawasan perdagangan bebas. Pada masa itu kemampuan bangsa kita untuk bersaing akan sungguh-sungguh ditantang.

Perguruan tinggi, tidak terkecuali UNIB, dituntut untuk lebih mengembangkan perannya terutama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Peran UNIB mungkin agak unik, karena daerah Bengkulu walaupun secara geografis berada di kawasan Barat Indonesia, tetapi ditinjau dari karakteristik sosial-ekonominya lebih menyerupai daerah-daerah di kawasan Timur Indonesia. Sejalan dengan upaya kita untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan, peran UNIB dalam pembangunan daerah menjadi penting dan strategis.

Dalam kerangka pikir itulah saya akan menyampaikan ceramah ini. Agar kita semua mempunyai suatu pemahaman yang sama mengenai ke arah mana masa depan bangsa kita akan kita wujudkan, saya akan memulainya dengan pembangunan berwawasan masa depan menuju akhir PJP II nanti. Selanjutnya, akan saya bahas konsep dan strategi pembangunan daerah yang kemudian dikaitkan dengan karakteristik Propinsi Bengkulu. Pada bagian akhir, saya akan menutupnya dengan mencatat peran perguruan tinggi yang kita harapkan untuk menunjang pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

II. Pembangunan Berwawasan Masa Depan

Setelah melewati PJP I dengan prestasi pembangunan yang cukup memuaskan, bangsa Indonesia kini sedang memasuki PJP II dengan tingkat kompleksitas masalah yang jauh lebih rumit serta tantangan yang lebih besar lagi. Pembangunan nasional yang telah berlangsung selama hampir tiga dasawarsa ini, secara nyata berhasil mengantarkan masyarakat dan bangsa Indonesia ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Hasil pembangunan yang telah kita capai dalam PJP I itu merupakan modal yang amat berharga dalam upaya kita mewujudkan bangsa Indonesia yang **maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan** pada akhir PJP II. Pada saat itu masyarakat Indonesia sudah akan menjadi masyarakat industri yang modern. Ekonomi Indonesia sudah akan

menjadi salah satu ekonomi yang besar di dunia. Kita akan tiba pada momentum yang memungkinkan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan dasar sumber daya manusia Indonesia sendiri.

Wujud masa depan bangsa di akhir PJP II itu tentu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Harus ada upaya-upaya yang dirancang dengan seksama dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan melibatkan segenap potensi dan kekuatan yang kita miliki. Hal ini terlebih penting karena dalam milenium baru itu akan berlangsung perubahan-perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam masyarakat kita sendiri maupun dalam masyarakat dunia.

Kehidupan perekonomian nasional dewasa ini sedang mengalami proses transformasi yang cukup mendasar. Dalam hal ini, ketahanan ekonomi nasional harus kita perkuat. Membangun dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional harus diartikan bukan semata-mata untuk pertumbuhan (*growth*), tetapi yang lebih mendasar lagi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata, mengatasi kesenjangan sosial, serta mengentaskan kemiskinan sampai tuntas dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Dalam tahun-tahun mendatang masalah-masalah tersebut merupakan isu krusial dalam pembangunan, yang menuntut segenap perhatian dan daya yang kita miliki.

Dalam rangka itu, salah satu tantangan besar yang kita hadapi adalah pemerataan pembangunan antardaerah.

III. Konsep dan Strategi Pembangunan Daerah

Kita sadar bahwa walaupun pembangunan selama ini telah meningkatkan taraf hidup semua lapisan masyarakat, dan semua daerah telah mencatat kemajuan tanpa kecuali, namun, kenyataan juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada tingkat kemajuan di antara lapisan-lapisan masyarakat dan di antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kesenjangan antardaerah merupakan salah satu masalah pembangunan yang pokok bagi bangsa kita.

Indonesia adalah negara yang besar, baik luas wilayahnya maupun jumlah penduduknya. Oleh karena itu, pembangunannya tidak mungkin dapat dilakukan secara terpusat, melainkan harus dilakukan secara terdesentralisasi dan dengan pendekatan kewilayahan. Dengan pendekatan demikian, maka pembangunan daerah (*regional*) kita pandang sebagai dimensi tak terpisahkan dari dimensi pembangunan makro dan sektoral. Daerah adalah tempat atau ruang (*space*) bagi pembangunan sektoral dalam rangka mencapai sasaran-sasaran makro nasional. Pembangunan regional dan sektoral haruslah merupakan sisi-sisi upaya pembangunan yang sama, ibarat cermin yang satu mencerminkan yang lainnya dalam dimensinya masing-masing.

Dewasa ini, di Indonesia khususnya pandangan-pandangan mengenai pembangunan daerah tampaknya telah mulai terkristalisasi. Kristalisasi itu telah melahirkan persamaan persepsi mengenai arti pentingnya pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini menunjukkan tingkat kematangan kita sebagai bangsa yang menganut paham Wawasan Nusantara.

Dengan pemahaman yang makin mantap akan *ke-bhinnekatunggal-ika-an* bangsa, maka kita dapat mengembangkan konsep pembangunan daerah yang lebih nyata di atas landasan beberapa kaidah pokok, antara lain yang utama adalah sebagai berikut.

Pertama, bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu. Semua kekayaan alam Indonesia adalah milik seluruh bangsa Indonesia, yang harus dapat dinikmati dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, tidak boleh ada penduduk yang kebetulan dilahirkan dan hidup di daerah yang miskin sumber daya terus-menerus miskin dan di daerah yang kaya mempunyai hak untuk selamanya lebih kaya dari penduduk di daerah lainnya.

Kedua, mempertemukan prinsip bahwa kekayaan alam adalah hak setiap warga negara di mana pun dia berada dengan hak masyarakat di suatu daerah menikmati kekayaan alam (*natural endowment*) di wilayahnya. Kunci keberhasilan pembangunan daerah, dalam hal ini, adalah

menemukan strategi yang tepat untuk mengakui keterkaitan masyarakat dengan alam lingkungannya di satu pihak serta dengan paham persatuan dan wawasan nusantara di pihak lain.

Ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara lebih menyeluruh. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan hanya dimungkinkan apabila pembangunan didesentralisasikan sampai sedekat mungkin pada masyarakat. Artinya, perencanaan pembangunan harus dimulai dari bawah, meskipun juga harus memperhatikan batasan-batasan dan sasaran-sasaran makro, baik makro nasional, makro sektoral, maupun makro regional. Pengambilan keputusan dalam proses pembangunan yang menyangkut masyarakat harus berpangkal pada simpul yang paling dekat dengan masyarakat.

Berdasarkan beberapa kaidah pokok tersebut dirumuskan strategi pembangunan daerah, yang pangkal tolaknya adalah mengenali adanya tiga aspek dalam apa yang dimaksud dengan *daerah* dalam *pembangunan daerah* yaitu, sisi (1) politik dan pemerintahan, (2) ekonomi, dan (3) budaya.

Pertama, politik dan pemerintahan. Daerah dalam arti ini berkaitan dengan kelembagaan pemerintah daerah yang mengacu kepada Pasal 18 UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut oleh peraturan perundangan, khususnya Undang-undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1979. Daerah di sini adalah unit-unit pemerintahan, baik yang bersifat otonom maupun administratif. Pembangunan daerah dalam pengertian ini lebih dititikberatkan pada kelembagaannya, yaitu pembangunan untuk memampukan dan memandirikan pemerintah daerah, baik sebagai aparat pelayanan masyarakat maupun sebagai aparat pembangunan.

Dalam bidang politik dan pemerintahan, pembangunan daerah meliputi upaya-upaya untuk mengembangkan (i) kualitas sumber daya manusia, yang meliputi kemampuan, sikap mental, dan disiplin; (ii) organisasi dan tata kerja sehingga menjamin efisiensi dalam pelayanan masyarakat dan upaya pembangunan; (iii) keterbukaan dan kebertanggungjawaban sebagai sikap normatif aparat pemerintah; (iv) kontrol sosial dan komunikasi sosial sehingga tidak ada sekat antara pemerintah dan masyarakat, dan dapat berkembang suasana yang kritis dan sehat dalam masyarakat dalam hubungan dengan pemerintah; (v) peranan lembaga demokrasi di daerah, baik lembaga-lembaga perwakilan, organisasi-organisasi politik dan kemasyarakatan, maupun media massa.

Kedua, daerah dalam pengertian suatu maujud (*entity*) atau wilayah ekonomi. Pembangunan daerah dengan demikian adalah pembangunan ekonomi wilayah dan masyarakat yang bersangkutan. Pembangunan daerah dalam pengertian ini adalah sinonim dengan pembangunan ekonomi daerah.

Pembangunan ekonomi daerah pertama-tama harus mengenali potensi yang ada di daerah, baik potensi alam maupun manusia, dan strateginya adalah mengembangkan potensi itu. Oleh karena tidak sama tingkat kemajuannya, maka ada daerah-daerah yang memerlukan bantuan pemerintah pusat lebih besar dari pada daerah lainnya. Bantuan ini dapat berupa investasi dalam prasarana, dana, atau pun sumber daya manusia, atau pun perlakuan-perlakuan khusus seperti insentif fiskal atau dalam kebijaksanaan perizinan.

Selanjutnya, pembangunan ekonomi daerah secara ideal harus mengupayakan dua hal, yakni (i) mengembangkan kewirausahaan, dan (ii) mengembangkan sumber pendapatan daerah. Kedua aspek itu amat penting untuk membangun daerah agar maju, mandiri, dan sejahtera, yang menjadi sasaran pembangunan nasional dan harus menjadi sasaran juga bagi pembangunan daerah. Di banyak daerah, kewirausahaan memang masih terbatas kemampuan pengembangannya karena kelangkaan potensi-potensi pengusaha (kuantitas maupun kualitas), yang antara lain disebabkan oleh kurangnya pengalaman dan juga kurangnya kemampuan untuk mendapatkan akses pada modal, teknologi, informasi, atau juga pasar. Oleh karena itu, maka menjadi kepentingan pembangunan ekonomi daerah untuk merangsang investasi dari luar daerah, dan untuk itu perlu ada suasana investasi yang menarik bagi dunia usaha dari luar untuk datang ke

daerah. Adanya pungutan-pungutan yang tidak jelas dasar hukumnya pasti akan menghambat minat investasi usaha swasta.

Pelaku utama pembangunan adalah masyarakat. Peran pemerintah adalah menciptakan suasana yang mendukung, dan membantu kelancaran usaha masyarakat. Dalam rangka itu pemerintah memang berkewajiban menyediakan prasarana ekonomi dan sosial, untuk melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, pemerintah tidak bisa dan tidak akan pernah bisa mengambil alih kegiatan pembangunan dari masyarakat. Bahkan sebaliknya, pemerintah harus melepaskan kegiatan ekonomi yang selama ini dilakukannya apabila masyarakat telah dapat menjalankannya. Biasanya masyarakat dapat menjalankan kegiatan ekonomi lebih efisien dari pada pemerintah.

Dari segi perencanaan, harus dipahami bahwa karakteristik dan potensi ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda. Oleh karena itu, pendekatan kewilayahan, yang memahami adanya apa yang disebut kekhasan daerah (*local* atau *region specific*), perlu dikembangkan. Dalam hal ini, dalam kerangka tata ruang nasional, sekarang sedang dikembangkan konsep kawasan andalan, yang memadukan pertimbangan-pertimbangan potensi pembangunan daerah dengan investasi di berbagai sektor terutama prasarana untuk merangsang berkembangnya kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk-produk yang menjadi unggulan daerah yang bersangkutan.¹

Ketiga, daerah sebagai sebuah konsep budaya.² Bangsa Indonesia menjunjung tinggi kebudayaan daerah yang oleh UUD 1945 dikatakan sebagai puncak-puncak kebudayaan bangsa. Kebudayaan nasional adalah terdiri dari kebudayaan yang terbentuk dari sintesa berbagai kebudayaan daerah, atau yang juga telah menampung nilai-nilai budaya luar yang telah bersenyawa dengan budaya nasional (misalnya yang masuk bersama agama atau nilai-nilai modern), dan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah itu pun ada yang masih sebagaimana aslinya, tetapi ada juga yang sudah berkembang dengan menyerap nilai-nilai luar, baik dari dalam lingkungan, maupun dari luar bangsa kita.

Daerah, dengan demikian selain dapat dilihat dari segi maujud politik dan pemerintahan serta ekonomi, juga harus dilihat dari sudut pandang kebudayaan. Pembangunan daerah, dalam pengertian ini harus: (i) sesuai, tidak bertentangan dan bahkan berakar pada kebudayaan masyarakat, dan (ii) harus memajukan harkat dan martabat masyarakat yang tercermin dalam kebudayaannya.

Menyeragamkan pembangunan daerah dalam bidang ekonomi adalah keliru, seperti telah diuraikan di atas, apalagi secara kebudayaan. Kekhasan daerah (*local specific*) harus diartikan selain memahami dan berupaya mengenali potensi alam setempat, adalah juga dan bahkan mungkin terutama, memahami dan menghargai kebudayaan daerah. Artinya, strategi pembangunan daerah haruslah bersandar pada kebudayaan daerah.

¹ Kawasan andalan adalah kawasan-kawasan yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan di sekitarnya, serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang di wilayah nasional. Kawasan tersebut ditentukan berdasarkan potensi yang ada, memiliki aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan dan kegiatan produksi serta pertimbangan perkembangan daerah sekitarnya. Kawasan ini ditetapkan untuk mengupayakan sinergi keselarasan perkembangan antarwilayah dan antarsektor. Secara nasional ada 111 kawasan andalan, dua di antaranya berada di Propinsi Bengkulu, yaitu kawasan Kodya Bengkulu dan sekitarnya, dan kawasan Manna dan sekitarnya.

² Ruang (dalam arti ruang wilayah), seperti dikatakan oleh Heaphey dkk, "*is a cultural creation just as language is, and it is learned through the same kinds of cultural processes*", dalam artikel "*Spatial Aspects of Development Administration*", dalam buku *Spatial Dimensions of Development Administration*, Durham, N.C.: Duke University Press, 1971.

Kemajemukan kebudayaan bangsa Indonesia, menyebabkan pendekatan pembangunan untuk setiap daerah harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.³ Meskipun unsur-unsur pembangunan itu serupa di mana pun, seperti perlunya investasi swasta, pembangunan prasarana perhubungan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan, dan sebagainya, namun dalam perencanaannya harus tidak boleh lepas dari pandangan yang mempertimbangkan kebudayaan setempat. Di tingkat daerah itu sendiri, acapkali harus pula dikenali adanya sistem budaya yang mungkin berbeda di kalangan masyarakat daerah dan harus dipahami dan dihargai.

Dengan demikian, kesimpulannya adalah bahwa kita harus berupaya untuk menjadikan kebudayaan daerah kekuatan yang mendorong pembangunan dan bukan yang menghalangi pembangunan.

IV. Pembangunan Propinsi Bengkulu

Pada masa-masa mendatang usaha pembangunan akan diarahkan ke wilayah-wilayah yang masih relatif tertinggal, utamanya di kawasan Timur Indonesia dan di sejumlah daerah yang memiliki karakteristik sama seperti KTI. Dalam hal ini Propinsi Bengkulu juga perlu mendapat perhatian khusus, mengingat daerah Bengkulu masih relatif tertinggal dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain di kawasan Barat Indonesia. Kita sudah bertekad untuk membangun daerah tertinggal sehingga bisa mencapai tahap kemajuan yang memadai sebagaimana yang telah dialami oleh daerah-daerah lainnya.

Berbicara mengenai pembangunan daerah Bengkulu, saya yakin bahwa Saudara-Saudara yang hadir di sini jauh lebih tahu dan faham daripada saya sendiri. Namun, dalam rangka menempatkan Bengkulu dalam kerangka pembangunan nasional yang utuh dan menyeluruh, izinkanlah saya mengemukakan gambaran ringkas mengenai karakteristik propinsi ini.

Pertama, marilah kita bicara mengenai karakteristik sosio-ekonomi Propinsi Bengkulu. Ditinjau dari aspek sosio-ekonomi, Bengkulu merupakan propinsi di Kawasan Barat Indonesia (KBI) namun memiliki karakteristik tidak jauh berbeda dengan propinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI).⁴

Saya mencatat bahwa pembangunan selama ini di Propinsi Bengkulu telah banyak memberikan hasil. Ada beberapa indikator sosial ekonomi yang menunjukkan tingkat keberhasilan tersebut.

Pertama, sedang berlangsung proses transformasi struktur ekonomi. Proses transformasi ini terlihat dalam dinamika perekonomian daerah, yang secara perlahan mulai menuju ke sektor

³ Dalam banyak kepustakaan ditemukan pandangan bahwa kebudayaan, terutama yang bersifat tradisional, adalah penghambat kemajuan, dan bahwa proses modernisasi adalah transformasi kebudayaan tradisional menjadi kebudayaan modern. Pandangan itu tidak seluruhnya benar karena banyak nilai-nilai budaya asli yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat modern, bahkan dapat memberikan keasrian kepada budaya masyarakat modern. Bahkan ada nilai-nilai asli yang dapat diperkuat dengan nilai-nilai modern sehingga menjadi kekuatan pembangunan yang besar. Misalnya, nilai tradisional masyarakat Jepang yang bersenyawa dengan nilai modern telah menghasilkan kekuatan yang dahsyat dalam mengubah suatu bangsa yang terbelakang menjadi bangsa yang maju dalam waktu yang relatif singkat.

⁴ Penduduk propinsi ini pada tahun 1995 adalah 1,4 juta jiwa, sekitar 3,4 persen dari penduduk di Sumatera, dengan kepadatan yang lebih rendah dari rata-rata kepadatan penduduk di KBI. Namun, laju pertumbuhan penduduk di propinsi ini paling tinggi di Sumatera, yaitu 3,6 persen per tahun dalam periode 1990-1995, atau 2,4 kali pertumbuhan rata-rata di KBI. Struktur ekonomi Bengkulu masih didominasi oleh sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Bengkulu adalah 37,04 persen pada tahun 1995 sedangkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional pada saat yang sama adalah 17,09 persen dan kontribusi industri pengolahan sudah mencapai 24,14 persen.

perdagangan dan jasa.⁵ Proses transformasi struktural ini sesuai dengan strategi pembangunan nasional jangka panjang, yang mengarah pada peningkatan peran sektor industri dan menurunnya secara relatif peran sektor pertanian. Dalam konteks modernisasi masyarakat, peningkatan peran sektor industri tersebut sangat kompatibel dengan proses industrialisasi yang sedang berlangsung sekarang ini. Dengan demikian, sektor pertanian seperti perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, dan perikanan yang merupakan potensi paling menonjol di daerah Bengkulu perlu dikembangkan dengan pendekatan industrial.

Kedua, terdapat peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang berarti, yang antara lain ditunjukkan dengan penurunan angka kematian bayi per 1000 kelahiran dari 69 anak pada tahun 1990 menjadi 56 anak pada tahun 1995, walaupun masih di atas rata-rata nasional yakni sebesar 55. Dalam kurun waktu yang sama angka harapan hidup meningkat dari 60,2 tahun menjadi 64,2 tahun, dan telah sedikit di atas rata-rata nasional (63,5 tahun).

Ketiga, derajat pendidikan penduduk juga telah membaik antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah, ratio guru dan murid, dan persentase kemampuan membaca dan menulis. Dari ketiga indikator tersebut terlihat bahwa program pendidikan di Bengkulu cukup berhasil dan berada sedikit di atas angka rata-rata untuk wilayah Sumatera.⁶

Dengan berlandaskan pada hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini Propinsi Bengkulu harus merancang masa depannya secara terkait dan saling menunjang dengan rancangan pembangunan nasional.

Keberlanjutan pembangunan suatu wilayah akan sangat ditentukan oleh keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif wilayah tersebut. Kondisi *eco-region* Bengkulu yang memiliki gradien ekologi yang sempit mengisyaratkan bahwa pola intensif pemanfaatan lahan adalah terbatas. Artinya kegiatan-kegiatan yang bergantung langsung pada lahan atau ruang baik sebagai input produksi maupun sebagai pengasimilasi limbah, perlu sangat dibatasi.

Ada dua pendekatan yang harus ditempuh. *Pertama*, pembangunan Propinsi Bengkulu dilakukan dengan cara mengembangkan pola pemanfaatan ruang dan sumber daya untuk aktifitas-aktifitas nonkonsumtif. Dalam hal ini antara lain adalah pengembangan pariwisata. *Kedua*, mengembangkan "industri" yang tidak mengeluarkan banyak limbah pabrik. Industri seperti ini

⁵ PDRB per kapita Propinsi Bengkulu selama kurun waktu 20 tahun terakhir masih berada di bawah rata-rata PDRB perkapita propinsi di Sumatera. Namun secara perlahan mengalami peningkatan yang cukup berarti yakni dari Rp. 34,9 juta pada tahun 1975 menjadi Rp. 2.088,1 juta pada tahun 1995. Komposisi PDRB terbesar adalah dari sektor perdagangan, transportasi, jasa dan lainnya yang mencapai 49,35 persen, sementara sektor pertanian sebanyak 37,04 persen. Pada tahun 1995 penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 64,7 persen, namun sumbangannya terhadap PDRB hanya 37 persen saja. Sementara penduduk yang bekerja di sektor perdagangan dan jasa sebanyak 27,3 persen, namun memberikan sumbangan pada PDRB sebesar 49,5 persen. Penting dicatat bahwa persentase penduduk yang bekerja pada sektor pertanian ini mengalami penurunan dari 80,9 persen pada tahun 1980 menjadi 70,9 persen pada tahun 1990. Pada periode tahun yang sama, penduduk yang bekerja di sektor lain seperti perdagangan dan jasa (keuangan, transportasi, dan yang lain) meningkat dari 14,5 persen menjadi 22,7 persen.

⁶ Partisipasi kasar sekolah dasar pada tahun 1995/96 sebesar 116,79 persen di atas angka rata-rata daerah Sumatera yakni sebesar 114,26 persen. Namun demikian, angka partisipasi kasar untuk sekolah menengah tingkat pertama hanya mencapai 59,46 persen; angka ini berada di bawah angka partisipasi di Sumatera yakni 65,84 persen. Ratio jumlah murid per guru sekolah dasar sebanyak 19 orang, hanya selisih satu angka saja dibandingkan dengan di daerah Sumatera yang mencapai 20 orang. Terakhir, jumlah penduduk berusia 10 tahun ke atas yang pandai membaca dan menulis sebesar 89,03 persen; angka ini berada di atas rata-rata nasional yang baru mencapai 84,06 persen, namun sedikit di bawah rata-rata Sumatera yang telah mencapai 90,55 persen.

umumnya sangat padat sumber daya manusia seperti industri elektronika, industri kecil kerajinan rakyat, dan agroindustri.

Persoalan utamanya adalah bagaimana mewujudkan hal tersebut. Tidak ada alternatif lain kecuali melalui pengembangan sumber daya manusia. Di sini terletak peranan dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi.

IV. Peran Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan lembaga yang sangat strategis dalam mendorong percepatan pembangunan masyarakat. Dengan sejumlah keunggulan yang dimilikinya seperti sumber daya manusia, perangkat kelembagaan yang mapan, serta kemampuan membuat riset dan kajian, maka perguruan tinggi seyogianya berperan sebagai agen pembangunan (*agent of development*). Dalam konteks Universitas Bengkulu, peran tersebut menjadi lebih mungkin dilakukan mengingat di universitas ini telah tersedia sumber daya manusia bermutu yang memadai.⁷ Dengan potensi sumber daya manusia berkualitas yang memadai itu, sudah sewajarnya bila Universitas Bengkulu mampu mengambil peran dalam pembangunan bukan hanya dalam skala regional melainkan juga dalam skala nasional. Bahkan universitas ini dapat berkembang menjadi salah satu pusat unggulan (*center of excellence*), jika ada upaya sungguh-sungguh ke arah itu. Dengan demikian dapat menampung mahasiswa dari luar daerah Bengkulu selain mahasiswa daerah sendiri.⁸

Dalam konteks pembangunan daerah, beberapa hal harus bisa diperankan oleh perguruan tinggi, antara lain sebagai berikut:

Pertama, membangun sumber daya manusia daerah yang berkualitas dengan meningkatkan dan memperkuat basis pendidikan masyarakat. Membangun sumber daya manusia berkualitas ini mempunyai makna sangat strategis bagi pembangunan jangka panjang. Pandangan pembangunan dewasa ini menunjukkan sumber daya manusia sebagai variabel utama yang menentukan keberhasilan pembangunan.

Kedua, mengadakan studi-studi kebijakan untuk disumbangkan kepada pemerintah daerah sehingga memudahkan dalam menentukan prioritas program pembangunan berdasarkan kebutuhan daerah. Juga membuat studi-studi evaluatif dalam upaya perbaikan program pembangunan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas program.

Ketiga, mengembangkan model-model pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sektor-sektor unggulan, yang dapat diangkat dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Model-model pembangunan tersebut diperlukan terutama untuk merumuskan program yang relevan dengan kondisi lokal dan masyarakat setempat.

Keempat, membangun kerjasama antara universitas, pemerintah daerah, dan masyarakat antara lain untuk (i) menyusun kebijakan dan program dalam agenda Repelita daerah, (ii) melaksanakan studi-studi spesifik sehubungan dengan usaha mengembangkan ekonomi masyarakat daerah, (iii) melakukan kajian-kajian terhadap program nasional yang akan diterapkan di daerah, sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan nasional di samping pembangunan daerah sendiri.

⁷ Menurut data yang ada, kualifikasi tenaga pengajar di Universitas Bengkulu sudah sangat baik, dari jumlah 536 orang dosen, sebanyak 287 atau 54 persen bergelar master dan doktor. Sementara yang sedang menempuh tugas belajar baik untuk program S2 maupun program S3 saat ini sebanyak 129 orang. Sehingga dalam waktu dua atau tiga tahun mendatang jumlah tenaga pengajar yang berkualifikasi master dan doktor akan bertambah menjadi 413 orang atau 78 persen. Proporsi tersebut sudah sangat baik dibandingkan dengan universitas-universitas yang lain, utamanya di Sumatera.

⁸ Fakultas Kedokteran Universitas Udayana berhasil menarik mahasiswa dari luar Bali termasuk di Jakarta, dan Universitas Hasanuddin merupakan universitas favorit bagi mahasiswa kawasan Timur Indonesia.

Kelima, memantapkan kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud pemihakan, utamanya kepada penduduk miskin. Pengabdian pada masyarakat tersebut dilakukan dengan cara membuat program kegiatan yang bisa mengembangkan ekonomi rakyat. Ini amat penting karena masyarakat di Propinsi Bengkulu, secara sosial ekonomi, masih tergolong lemah. Program tersebut akan semakin mantap lagi bila didukung oleh lembaga kajian yang menelaah mengenai masalah-masalah sosial ekonomi masyarakat.

Keenam, membantu mengerahkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka Tri Dharma-nya. Partisipasi masyarakat dapat dikembangkan antara lain melalui lembaga-lembaga swadaya dan kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang dimotivasi dan diprakarsai oleh perguruan tinggi.

Untuk bisa menyelenggarakan peranan itu dengan sendirinya perguruan tinggi itu sendiri harus memulai dengan pembangunan dalam dirinya. Terutama masyarakat menuntut bukan hanya bimbingan ilmu dan pengetahuan, tetapi juga keteladanan dalam perilaku baik para mahasiswa maupun para pengajar dan stafnya.

V. Penutup

Demikianlah beberapa pemikiran yang dapat saya kemukakan dalam kesempatan kali ini. Pada prinsipnya saya menaruh harapan yang besar kepada Universitas Bengkulu, untuk bisa memberikan kontribusi pemikiran dan ikut berperan lebih besar dalam pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Universitas Bengkulu dituntut untuk melahirkan sumber daya manusia yang bermutu dan tenaga-tenaga pembangunan yang profesional dan berkompeten.

Hanya dengan menyiapkan sumber daya manusia yang bermutu dan tenaga-tenaga profesional serta kompeten, kita akan mampu menghadapi tantangan masa depan yang lebih berat, dengan tingkat kompleksitas masalah yang lebih rumit. Tidak terlalu berlebihan bila tumpuan harapan itu, antara lain, terletak di Universitas Bengkulu, yang sekarang sedang tumbuh menjadi salah satu universitas terbaik di Sumatera.